

**PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2016  
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi diKecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**ANITA WULANDARI  
NPM.1351010004**

**Jurusan:Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

**PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2016  
TERHADAPPENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A  
Pembimbing II : Budimansyah, M.Kom.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

## ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan dan dampak program ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin dalam perspektif ekonomi Islam?, Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan program dan dampak alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin dalam perspektif ekonomi Islam. Kegunaan penelitian agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan yang di ambil dan sebagai pedoman program ADD.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah aperatur desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Padang Cermin, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa model Miles dan Huberman dengan metode berfikir deduktif.

Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD 2016 di Kecamatan Padang Cermin sudah menggunakan asas adil dan merata di beberapa desanya yaitu desa Tambangan dan Way Urang. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2016 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena ADD yang sangat minim sehingga komposisi pembagiannya dirasakan kurang untuk masing-masing kegiatan seperti masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karena aperatur desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan gorong-gorong yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan yang sudah dilaksanakan dari ADD tahun 2016 di Kecamatan Padang Cermin yaitu membuat gorong-gorong, pembangunan rabot beton, pembangunan sinitasi air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

***Kata Kunci : ADD, Kesejahteraan, dan Ekonomi Islam***



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

***Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703531, 780421***

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2016 TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : Anita Wulandari

NPM : 1351010004

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Rabu 21 Juni 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H.Suharto, S.H., M.A**  
NIP. 195304231980031003

**Budimansyah, M.Kom.I**  
NIP. 19770725200212 1 001

Ketua Jurusan,

**Madnasir. S.E., M.Si**

NIP. 19750424 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703531, 780421**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2016 TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran) disusun oleh Anita Wulandari, NPM 1351010004, Jurusan Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu 21 Juni 2017.

**TIM DEWAN PENGUJI :**

Ketua : Dr. Moh. Bahrudin, M.A. (.....)  
Sekretaris : Deki Fermansyah, M.Si. (.....)  
Penguji I : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I. (.....)  
Penguji II : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A. (.....)

**Dekan**

**Dr. Muh. Bahrudin, M.A**

NIP. 19580824 198903 1 003

## MOTTO

وَاتَّقُوا الْغَدِيقَدَّمَتَ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ اتَّقُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ (Q.S. Al-Hasyr ayat 18)

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al- Jamanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004), h. 548.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil'alamin*

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih nan Maha Penyayang nan Maha Bijaksana nan Maha Kuasa atas segala sesuatu, pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW manusia pembawa risalah. Manusia yang memiliki cinta yang teramat luas kepada umatnya. Saya senantiasa berdoa, semoga Saya bisa bertemu dengannya di telaga Al-Kautsar, amin. Karya sederhana ini Saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta, bapak Bardo dan ibu Nurhayanah yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, nasehat, semangat, dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Saya. Mereka yang begitu istimewa dalam hidup Saya dan kucinta karena Allah.
2. Tak lupa kusampaikan terima kasih atas do'a, canda tawa adik-adikku (Sulis Setia Wati dan Oni Kristina Pramita) tersayang. Semoga kita semua bisa membuat kedua orang tua kita selalu bahagia.

## RIWAYAT HIDUP

**Anita Wulandari**, lahir di Dusun Tegal Rejo Desa Gunung Rejo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, pada tanggal 13 November 1994. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Bardo dan ibu Nurhayanah.

1. Dimulai pada tahun 2001 penulis sekolah di SDN 2 Padang Cermin.
2. Tahun 2007 penulis sekolah di SMP Negeri 2 Padang Cermin.
3. Tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Padang Cermin, selama masa SMA, penulis pernah aktif di OSIS, ROHIS, Paskibraka, silat dan PRAMUKA.
4. Tahun 2013 dengan dukungan dari kedua orang tua dan tekad yang kuat dan selalu mengharap ridho Allah SWT, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah dengan penuh harapan dapat bertambahnya ilmu pada diri penulis. Penulis pernah tergabung dalam RISEF. Pada bulan Agustus 2015 peneliti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Rasa syukur senantiasa kucurahkan kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik Cinta, Allah SWT. Jika tanpa kuasa-Nya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW manusia yang mengajarkan kepada umat manusia betapa indahnya iman dan Islam. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr.Moh. Bahrudin, M.A., selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang senantiasa mengayomi mahasiswa.
3. Bapak Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua prodi ekonomi Islam yang memberikan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A Selaku pembimbing I dan bapak Budimansyah, M.Kom.I. selaku pembimbing II yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya, menuntun dan mengarahkan, membimbing, memberikan

begitu banyak inspirasi kepada penulis untuk berkarya sebaik-baiknya, serta pelajaran yang tiada ternilai harganya demi keberhasilan penulis.

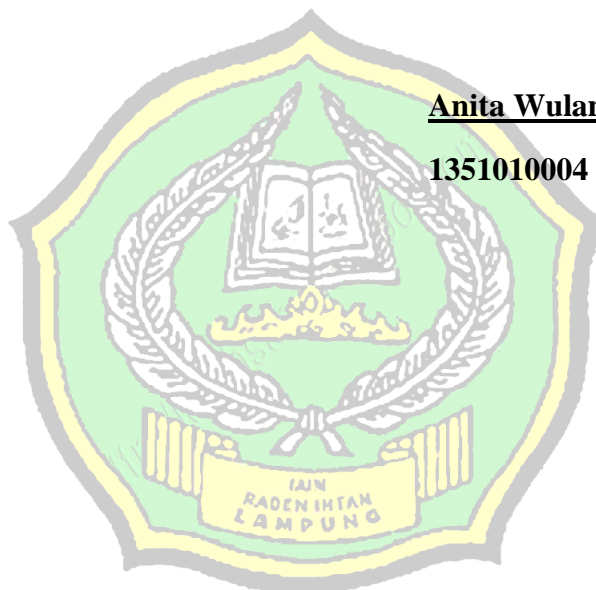
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (khususnya Jurusan Ekonomi Syari'ah) yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.
6. Aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat di Kecamatan Padang Cermin yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh data-data untuk penelitian.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Ekonomi dan Bisnis Islam dan Institut yang telah memberi informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Sahabat dan teman tersayang asrama Acronics dan Ma'had Al-Jami'ah (Tri Wahyuni, Santi, Umi Nurohmah) persahabatan dan kebersamaan kita tak akan kulupakan, teman saya (Rian Andika) yang selalu membantu di dalam penyusunan skripsi dan juga ucapan terimakasih atas perhatiannya selama ini terhadap penulis. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin saya sampai di sini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
9. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam kelas C angkatan 2013 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan Satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan kebaikan pada semua pihak yang telah membantu serta mendo'akan sampai terselesaikannya skripsi ini. Amin  
Yaa Robal'amin.

Bandar Lampung, Juli 2017

**Anita Wulandari**

**1351010004**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYATHIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATAPENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTARTABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. PenegasanJudul .....	1
B. AlasanMemilihJudul .....	2
C. LatarBelakangMasalah .....	3
D. Batasan dan RumusanMasalah.....	9
E. TujuandanKegunaanPenelitian .....	10
F. MetodePenelitian.....	11
G. Tinjauan Pustaka .....	21
<b>BAB II     LANDASANTEORI</b>	
A. Ekonomi Islam .....	22
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	22
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam .....	23
3. Pengertian Sistem Ekonomi Islam.....	23
4. Nilai-nilai dalam Sistem Ekonomi Islam .....	24
5. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam .....	25
B. Ekonomi.....	28
1. Pengertian Ekonomi.....	28

2. Pengertian Sistem Ekonomi .....	28
3. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi .....	29
4. Kebijakan Ekonomi .....	31
C. Belanja Negara .....	31
1. Dana Perimbangan (DAU dan Bagi Hasil) .....	31
2. Program Alokasi Dana Desa .....	32
3. Dana Alokasi Desa .....	38
D. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam .....	43
1. Pengertian Kesejahteraan ( <i>Falah</i> ) dalam Ekonomi Islam .....	43
2. Indikator Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam .....	49
E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat .....	51
1. Pengertian Kesejahteraan .....	51
2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat .....	52
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	54
4. Kiat-kiat Mancapai Kesejahteraan .....	60

### **BAB III PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Padang Cermin .....	61
2. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Padang Cermin .....	62
3. Kondisi Demografis Kecamatan Padang Cermin .....	62
4. Struktur Organisasi Pemerintahan .....	68
B. Kondisi Masyarakat di Kecamatan Padang Cermin .....	71
C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa 2016 di Kecamatan Padang Cermin .....	79

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pelaksanaan Program ADD 2016 dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .....	90
B. Dampak ADD 2016 dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .....	95
C. Pelaksanaan serta Dampak Program ADD 2016 dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam ...	101

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Populasi Penelitian .....	16
Tabel 1.2 Jumlah Sempel Penelitian .....	18
Tabel 1.3 Komponen dalam Analisis Data.....	19
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Padang Cermin .....	63
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	64
Tabel 3.3 Penduduk Berdasarkan Agama .....	64
Tabel 3.4 Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah.....	65
Tabel 3.5 Berdasarkan Lembaga Pendidikan.....	65
Tabel 3.6 Sarana Kesehatan .....	66
Tabel 3.7 Kondisi Rumah .....	66
Tabel 3.8 Kondisi Perekonomian .....	68
Tabel 3.9 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Cermin 2016 .....	70
Tabel 3.10 Tingkat Pendidikan Masyarakat 2016 .....	72
Tabel 3.11 Tingkat Kesehatan Masyarakat .....	73
Tabel 3.12 Pendapatan Rata-Rata Penduduk Tahun 2015 .....	75
Tabel 3.13 Pendapatan Rata-Rata Pada Tahun 2016 .....	75
Tabel 3.14 Pola Konsumsi Masyarakat Tahun 2016 .....	77
Tabel 3.15 Tingkat Perumahan Masyarakat Tahun 2016 .....	78

Tabel 4.1 Indikator Kesejahteraan Sebelum Ada ADD Tahun 2016 dan Sesudah Ada

ADD ..... 95

### DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permintaan Surat Izin Pra Riset
- Lampiran 2 Permintaan Izin Riset
- Lampiran 3 Surat Izin Pra Riset dari Kecamatan Padang Cermin
- Lampiran 4 Surat Izin Riset dari Kecamatan Padang Cermin
- Lampiran 5 Lembar Keputusan Dekan
- Lampiran 6 Daftar Wawancara
- Lampiran 7 Profil Kecamatan Padang Cermin
- Lampiran 8 Undang-Undang dari Kabupaten Pesawaran
- Lampiran 9 Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. PenegasanJudul**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dan menghindari perbedaan persepsi terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu akan dikemukakan penegasan judul terhadap pokok permasalahan. Adapun judul skripsi ini adalah **“PELAKSANAAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2016DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”**.Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Program/Rencana

Program yaitu seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumberdaya yang tersedia dan menghasilkan manfaat.<sup>2</sup>

2. AlokasiDanaDesa

---

<sup>2</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 91.



ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).<sup>3</sup>

### 3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>4</sup>

### 4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi Islam cara Islami (berdasarkan ajaran agama Islam).<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah menganalisa dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan Program ADD 2016 di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dapat mensejahterakan masyarakat atau tidak.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup>Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 133.

<sup>4</sup>Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012), h. 145.

<sup>5</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 17.

### 1. Alasan Obyektif

Dewasa ini adanya program alokasi dana desa menjadi isu sentral yang dilakukan pemerintah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

### 2. Alasan Subyektif

Karena judul tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu Jurusan Ekonomi Islam serta didukung oleh tersedianya literatur baik yang primer maupun sekunder dan penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian tersebut.

## C. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik, atau pun pembangunan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional rill dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu di

---

<sup>6</sup>Loncolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 31.

tunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.<sup>7</sup> Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini pembangunan desa mengutamakan prinsip imbangan kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.<sup>8</sup>

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan

---

<sup>7</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 1999) h. 14.

<sup>8</sup>Kansil dan Cristine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2002), h. 3.

Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “*Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)*”. Pada masa orde baru secara substensial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*, pada era reformasi secara substensial pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantara Program Inpres Desa Tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat *botten-up* atau kombinasi *top-down* dan *botten-up*. Program pembangunan desa yang bersifat *botten-up* tertuang dalam undang-undang Otonomi Daerah (OTDA).<sup>9</sup>

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk

---

<sup>9</sup>Rosnawati, *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar*, (Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 30.

menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang di tetapkan dalam Undang-undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan pada potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu desa.<sup>10</sup>

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada dengan membuka lapangan usaha baru untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini alokasi dana desa seharusnya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan

---

<sup>10</sup> AkbarPrabawa, “PengelolaanAlokasiDanaDesaDalamPembangunan di desa LoaLepuKecamatanTenggarongSeberangKabupatenKutaiKartanegara”. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3 No. 228 (Desember 2015).

memanfaatkan sumberdaya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki dengan aspirasi masyarakat prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, untuk itu Pemerintah membentuk Undang-undang No.6 Tahun 2004 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap mengembangkan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang di cantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirnya Alokasi Dana Desa (ADD).

Di dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran terdiri dari 11 (sebelas) desa yaitu: Padang Cermin, Durian, Sanggih, Gayau, Khopong Jaya, Hanau Berak, Tambangan, Paya, Way Urang, Trimulyo dan Banjaran, yang berjumlah 8.056 (delapan ribu lima puluh enam) KK. Kondisi perekonomian di Kecamatan Padang Cermin di dominasi pada sektor pertanian 70% (tujuh puluh persen), dan lainnya nelayan, pedagang, wiraswasta, PNS dan pensiunan sebesar 30% (tiga puluh persen). Di Kecamatan Padang Cermin ini mengalokasikan dana kesetiap desanya pada tahun 2016, berkisar antara Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) s/d

Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun, sudah termasuk anggaran untuk aperatur desa.<sup>11</sup>

Dengan diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman (QS. Ar-Ra'd:11):

...بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُونَ حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَّا يُغَيِّرُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ...<sup>12</sup>

Artinya: ...., Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....<sup>12</sup>

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan program alokasi dana desa 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin, bagaimana dampak pelaksanaan program alokasi dana desa 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin, dan bagaimana

---

<sup>11</sup>M. Yusuf (Sekertaris Camat), Wawancara dengan Penulis, Rekaman Suara,, Padang Cermin, 29 November 2016.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Jamanatul 'AliAl-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004), h. 350.

pelaksanaan serta dampak program ADD 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam, oleh karena itu dari latar belakang masalah diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam (studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”.

#### **D. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan tahun 2016 dalam program ADD ini.

Berdasarkan uraian diatas yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program alokasi dana desa 2016 terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin?
2. Bagaimana dampak alokasi dana desa 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin?
3. Bagaimana pelaksanaan serta dampak program ADD 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin dalam perspektif ekonomi Islam?



## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui pelaksanaan program alokasi dana 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin.
- b. Mengetahui dampak alokasi dana desa 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin.
- c. Mengetahui pelaksanaan serta dampak program ADD 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin dalam perspektif ekonomi Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Secara Teoritis**

Agar dapat tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu tentang ekonomi Islam.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Bagi Penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan program alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin.

- 2) Bagi Aparatur Desa: dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program alokasi dana desa.
- 3) Bagi Mahasiswa: dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode adalah “cara tepat untuk melakukan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian adalah “memikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta”. Jadi metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.<sup>16</sup> Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di Kecamatan Padang Cermin.

---

<sup>13</sup>M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975) h. 2.

<sup>14</sup>Cholid Nuroboko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h. 1.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

<sup>16</sup>Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan.

## **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan penulisan ini bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.<sup>17</sup>

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu: penelitian ini dilakukan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini, pengertian deskriptif yang penulis maksud adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Padang Cermin.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 208.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data secara langsung dari masyarakat dan aparat desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Padang Cermin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, internet dan sebagainya.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>18</sup> Dalam observasi penelitian menggunakan jenis observasi non partisipatif, dalam observasi ini pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Peneliti hanya menggunakan data-data yang sudah ada di wilayah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>18</sup>I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Mahadewi, *Metode Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, edisi 1), h. 52.

## b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.<sup>19</sup>

*Interview* sebagai suatu proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadap secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, merupakan alat mengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang *memanifes*.<sup>20</sup>

Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana *interview* tidak secara langsung mengarahkan Tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian.<sup>21</sup> Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.<sup>22</sup> Penentuan sumberdata kepada orang yang di wawancarai dilakukan secara

---

<sup>19</sup>Nasutrion, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 115.

<sup>20</sup>SutrisnoHadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi, 1989), h. 217.

<sup>21</sup>Nasution, *MetodelogiPenelitainPariwisataDanPerhotelan*, h. 64.

<sup>22</sup>*Ibid.* h. 65.

*purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu kepada orang-orang yang dipandang tahu situasi sosial tersebut.<sup>23</sup>

Penulis menggunakan metode ini sebagai pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar Kecamatan Padang Cermin.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>24</sup> Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, yang penulis peroleh dari berbagai media.

## 5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua individu untuk semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan.<sup>25</sup> Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian.<sup>26</sup> Populasi dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Op.Cit.* h. 216.

<sup>24</sup>SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 1992), h. 202.

<sup>25</sup>SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 206.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 130.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Populasi Penelitian**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah Aparatur Desa</b>	<b>Jumlah Tokoh Masyarakat</b>
1	Padang Cermin	54 orang	60 orang
2	Durian	19 orang	40 orang
3	Sanggih	19 orang	40 orang
4	Gayau	19 orang	40 orang
5	Khopong Jaya	11 orang	10 orang
6	Hanau Berak	21 orang	15 orang
7	Tambangan	10 orang	10 orang
8	Paya	8 orang	15 orang
9	Way Urang	14 orang	25 orang
10	Trimulyo	8 orang	15 orang
11	Banjaran	32 orang	30 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>215 orang</b>	<b>300 orang</b>

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Padang Cermin

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini terdiri dari aperatur desa 215 orang, tokoh masyarakat berjumlah 300 orang. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 515 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>27</sup> Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Op.Cit. h. 109.

populasi dan agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>28</sup>

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *sampling non random* atau *sample Nonprobabilitas* yaitu cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>29</sup> Cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposivesampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>30</sup>

Di Kecamatan Padang Cermin terdiri dari 11 (sebelas) Desa yang dijadikan populasi tapi karena keterbatasan penulis dalam mengelola data maka, penulis tidak menggunakan data secara keseluruhan untuk di olah. Tetapi untuk objektifitas data maka penulis menggunakan perwakilan sampel setiap desa yaitu aperatur desa, Tokoh Masyarakat yang mewakili masyarakat. Sampel ini diambil karena perencanaan program Alokasi Dana Desa merupakan hasil dari kesepakatan antara aperatur desa dengan tokoh masyarakat, oleh karena itu sampel diambil, dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 116.

<sup>29</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 91.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.



**Tabel 1.2**  
**Jumlah Sampel Penelitian**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah Aparatur Desa</b>	<b>Jumlah Tokoh Masyarakat</b>
1	Padang Cermin	2 orang	5 orang
2	Durian	2 orang	3 orang
3	Sanggi	2 orang	4 orang
4	Gayau	2 orang	1 orang
5	Khopong Jaya	2 orang	3 orang
6	Hanau Berak	2 orang	5 orang
7	Tambangan	2 orang	2 orang
8	Paya	2 orang	2 orang
9	Way Urang	2 orang	3 orang
10	Trimulyo	2 orang	2 orang
11	Banjaran	2 orang	3 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>22 orang</b>	<b>33 orang</b>

Sumber: Data di olah pada tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampel yang diambil digunakan dalam penelitian ini berjumlah 55 orang responden.

## **6. Pengolaan Data**

Setelah data dikumpul melalui beberapa tahap diatas, peneliti di dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

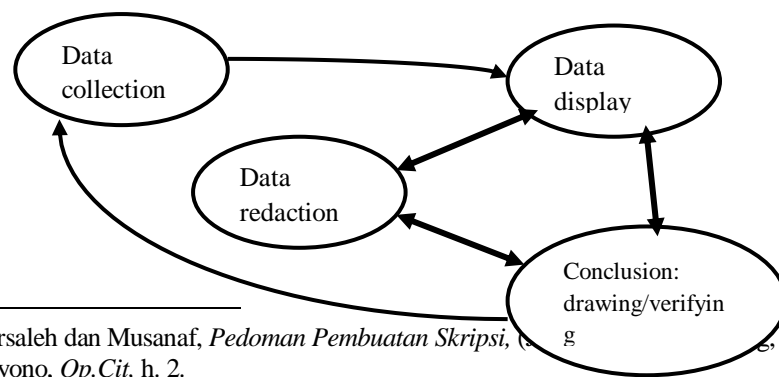
- a. Aditing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau releven dengan masalah.

- b. Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang diperoleh melalui obsevasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.<sup>31</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematif data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami,dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>32</sup>

Analisis data dilapangan ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis data ditunjukan pada tabel 1.3 berikut.<sup>33</sup>



<sup>31</sup>Moersaleh dan Musanaf, *Pedoman Pembuatan Skripsi*, (Geger, 1981), h. 72.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Op.Cit*, h. 2.

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 246.

### **Tabel 1.3Kompenen dalam Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.<sup>34</sup>

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan pendekatan kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>35</sup> Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari masyarakat disetiap desa yang ada di Kecamatan Padang Cermin dengan aparetur desa yang berkaitan dengan alokasi dana desa dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari data dan teori yang ada

---

<sup>34</sup>SutrisnoHadi, *Metode Research, Jilid 1*,(Yogyakarta: Andi, 2002), h. 42.

<sup>35</sup>KartinoKartono, *Op.Cit.* h. 352.

tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu pelaksanaan program alokasi dana desa 2016 dan Kesejahteraan Masyarakat.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Karya ilmiah dengan tema ADD dan kesejahteraan ada beberapa penulis temukan, diantaranya: 1. Skripsi dengan judul Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar, Karya Rosinawati, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun, 2015. Dimana fokus kajiannya pada masalah bagaimana dampak positif dan negatif ADD terhadap kesejahteraan pada Kecamatan Negeri Besar. 2. Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: PP RI Nomor 22 tahun 2015, PMK RI Nomor 93 tahun 2015, PP RI nomor 45 tahun 2015, SKB 3 menteri Tahun 2015, fokus kajian penelitian ini adalah kurangnya pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa. Karya A. Saibani. 3. Buku Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, strategi, dan peluang karya Muderajad Koncoro. Ph.D., (Erlangga, Jakarta, 2004) fokus kajian yaitu pada permasalahan perencanaan daerah di era otonomi, strategi pembangunan daerah, dan peluang pembangunan bisnis daerah.



## **A. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti ekonomi Islam. Beberapa ekonom muslim berusaha mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi Islam.

Adapun definisi-definisi tersebut antara lain:

- a. Muhammad bin Abdullah Al Arabi dalam At Tariqi (2004), menurutnya ekonomi Islam adalah “kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi

yang kita ambil dari Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.

- b. Muhammad Abdul Mannan (1993) mendefinisikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.
- c. Metwally (1995), menurutnya ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW, *ijma*, dan *qiyas*.
- d. Muhammad Syauki Al Fanjari dalam At Tariqi (2004), bahwa ekonomi Islam adalah sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.
- e. Abdullah Abdul Husain at Tariqi (2004), mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara mengembangkan harta.<sup>36</sup>

Jadi Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.

## **2. Dasar Hukum Ekonomi Islam**

Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur'an juga memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam itu sendiri. Al-Qur'an memberi hukum-hukum

---

<sup>36</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Airlangga, 2012), h. 7.

ekonomi yang dapat menciptakan kestabilan dalam perekonomian itu sendiri.<sup>37</sup>

### **3. Pengertian Sistem Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul pada satu kelompok saja, tapi tersebar keseluruh masyarakat.<sup>38</sup> Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi.

Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat untuk membangun sistem ekonomi Islam sesuai dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan. setiap masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka harus memiliki sistem yang mampu mengontrol dan memecahkan masalah ekonomi tersebut, ini sangat diperlukan karena satu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya.

### **4. Nilai-Nilai dalam Sistem Ekonomi Islam**

Secara khusus, nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syari'at.

---

<sup>37</sup>Hukum Ekonomi Islam, (On-Line) tersedia di: <http://www.islam.cendekia.com/2014/02/hukum-ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-al-quran.html> (18 Juli 2017)

<sup>38</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 11.

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:<sup>39</sup>

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- 2) Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok tertentu saja.
- 3) *Tafakul* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

## **5. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi Islam**

Prinsip dan tujuan dalam sistem Ekonomi Islam, juga bersumber pada ajaran syar'i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan candikiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi:

- a. *Tauhid*, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah.

---

<sup>39</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit*, h. 62.



Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus penuh dengan tanggung Jawab.<sup>40</sup>

- b. *Khalifah*, kesadaran sebagai wakil Allah dimukabumu melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini mengutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi Islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas.

Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari'ah. Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.

Tujuan syari'ah akan menjiwai manusia untuk bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan terletak pada urutan pertama tak lain karena keimanan akan memberikan cara pandang terhadap dunia yang

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 65.

dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti misalnya: prilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Sikap mental tersebut, secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan kebutuhannya.<sup>41</sup>

Menurut Abdul Manan (1993), landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep *Fundamental*, yaitu kemimpinan kepada Allah SWT (*tauhid*), kepemimpinan (*Khalifah*), dan keadilan (*a'dalah*). *Tauhid* adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan aktivitas baik yang mencakup ibadah (*abudilah*) mahdah (berkait sholat, dzikir dan sebagainya), termasuk ekonomi (*mu'amalah*), *muasyarah*, hingga *akhlak*.<sup>42</sup>

Ekonomi yaitu bagian dari *muamalah* secara umum dalam konsep islam harus memperhatikan prinsip *tauhid*, *khalifah* dan keadilan (*a'dalah*), yang harus berdampak manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera *al-falah*.<sup>43</sup>

Ekonomi Islam memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 67.

<sup>42</sup>Lukman Hakim, *Op.Cit*, h. 4

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 6.

memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemasalahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.<sup>44</sup>

Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk memecahkan persoalan penting yang dihadapi suatu sistem ekonomi. Tak terkecuali masalah ADD yang merupakan salah satu sasaran kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam alokasi dana desa, sehingga tercipta keadilan sosial di masyarakat secara luas.

## **B. Ekonomi**

### **1. Pengertian Ekonomi**

Menurut M. Manulang, Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa).<sup>45</sup>

Ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumberdaya yang langka (dengan dan tanpa uang), dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>46</sup>

Jadi ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan meningkatkan kualitas hidupnya.

---

<sup>44</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit*, h. 53.

<sup>45</sup>Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian teoritis dan Analisis Emperis*, (Bogor: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), 2013), h. 4.

<sup>46</sup>Pratama Rahardja, *et.al.*, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 3

## 2. Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi menurut

Kyato Sherdan sebagai organisasi sosial yang terdapat di dalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain sebagainya) yang bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan. Menurut John F. Due sistem ekonomi merupakan seluruh pranata (lembaga) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan tuntunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bukan satu lembaga atau instansi secara khusus. Suatu sistem akan memengaruhi pola berfikir dan bertindak masyarakat yang ada dalam sistem tersebut dan akan menjadi norma di masyarakat.<sup>47</sup>

Lebih jelasnya sistem ekonomi diartikan sebagai cara sesuatu ekonomi disusun, dikawal dan dilaksanakan, merupakan bagian dari sistem sosial yang antara keduanya tidak bisa dipisahkan secara sembarangan. Sedangkan instansi (lembaga) dalam suatu sistem adalah organisasi baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin maupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>48</sup>

Dengan demikian sistem ekonomi dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang menetap dan teratur. Dalam sistem ekonomi,

---

<sup>47</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 51.

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 52.

dibahas pula mengenai persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional.<sup>49</sup>

### **3. Prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi**

Setiap sistem ekonomi didasarkan pada ideologi tertentu yang secara langsung menggariskan prinsip-prinsip ekonomi, memberikan landasan dan tujuan dalam berekonomi. Prinsip dalam sistem ekonomi sangat ditentukan oleh pandangan hidup yang dianut, ini tidak lain agar tujuan sistem dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebagaimana prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis, yang menjadikan kepemilikan kapital dan mekanisme pasar sebagai unsur utama dalam aktivitas ekonominya dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham liberalis. Begitu juga pada sistem sosialis yang menjadikan kolektivitas serta mengabaikan kepemilikan individu sebagai prinsip, dapat berkembang pada masyarakat yang berpaham sosialis-komunis.

Selain prinsip dalam sistem ekonomi, tujuan sistem ekonomi juga sangat ditentukan oleh bagaimana satu sistem tersebut memandang dunia. Jika dipandang dari suatu sistem ekonomi bahwa dunia disediakan untuk sepenuhnya kepentingan manusia tanpa ada batasan-batasan norma, maka tujuan yang terbentuk hanyalah untuk kepuasan maksimum sebagaimana yang terdapat pada ekonomi kapitalis.

---

<sup>49</sup>Tulus T.H. Tambunan, *Op.Cit*, h. 2.

Hal ini berbeda dengan apa yang ada pada sistem ekonomi islam, yang memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki oleh ciptaan Tuhan, tentunya akan melahirkan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.<sup>50</sup>

#### **4. Kebijakan Ekonomi**

Kebijakan ekonomi adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik misalnya, meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Begitu juga dengan kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Kebijakan ekonomi yang masuk kedalam kebijakan sosial, sangat

---

<sup>50</sup>*Ibid*, h. 53

terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.<sup>51</sup>

## **C. Belanja Negara**

### **1. Dana Perimbangan (DAU dan Bagi Hasil)**

Transfer dana perimbangan ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian, transfer kedaerah ditetapkan dalam APBN, peraturan presiden, dan peraturan menteri keuangan (PMK) yang selanjutnya di tuangkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh direktorat jendral perimbangan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran atas nama menteri keuangan selaku pengguna anggaran untuk tiap jenis transfer ke daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah.

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besar kecilnya ADD akan ditentukan oleh DAU. DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan

---

<sup>51</sup>*Ibid.* h. 54.

APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## 2. Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Program/perencanaan (*planning*) yaitu fungsi dasar (*Fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun Harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan di ketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih”. Artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan.<sup>52</sup>

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Kunarjo program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek.

---

<sup>52</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 91.



Sementara itu menurut Jones program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumber-sumber daya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern.

Perencanaan menurut Williams, perencanaan adalah proses untuk mengantisipasi dan mengubah sesuatu yang belum terjadi, melihat jauh ke depan, mencari solusi yang optimal, yang dirancang untuk meningkatkan dan idealnya memaksimalkan manfaat pembangunan secara pasti dan yang akan menghasilkan hasil yang diprediksi.

Namun kita sebagai umat muslim memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan daripada pendapat pakar perencanaan tersebut. Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitupun dengan perencanaan.<sup>53</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam dalam (QS. Ar-Ra'd:11):



بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ اللَّهُ إِنَّ...<sup>54</sup>

Artinya: ....., Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....<sup>54</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan

---

<sup>53</sup>Abu Usamah Abdurrahmah, "Perencanaan Dalam Kaidah Islam" (On-line), tersedia di: <https://islamisone.wordpress.com/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam/> (14 Juni 2017).

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Al-Jamanatul 'AliAl-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004), h. 350.

sumber-sumber daya yang tersedia dan menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu:

(1) Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur; (2) Program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran; (3) Program dapat dihitung secara analisis *cost benefit*. Jadi kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya. Selain dari pada itu program sendiri terdiri dari berbagai macam, menurut Munir, bahwa program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi juga ruang lingkup, isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam :

a. Ruang lingkup

Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, kelompok, atau terbatas pada tempat dan kelompok tertentu. Beberapa program mungkin terpecah pada beberapa tempat dengan perhatian pada suatu hal tertentu.

b. Ukuran (*Size*)

Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin ribuan bahkan jutaan orang.

c. Durasi

Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya.

d. Kejelasan Dan Spesifikasi Program Input

Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara ekstern terdapat program-program tersebar, variabel lebih banyak dan kadang-kadang sulit untuk digambarkan.

e. Kompleksitas Tujuan

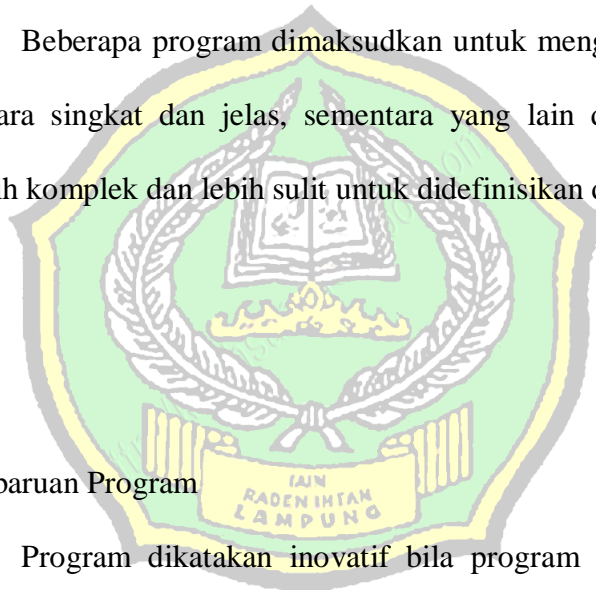
Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain dengan tujuan yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur.

f. Kebaruan Program

Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik kebiasaan yang ada.

Model kesesuaian ini akan dapat berjalan dan berhasil seperti yang diharapkan, apabila di dalam proses pelaksanaan terhadap program Menurut Kuncoro memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a. Proses pencairan ADD, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sasaran dengan apa yang ditawarkan oleh



program ini, dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi.

- b. Pengalokasian ADD kesesuaian antara keputusan-keputusan organisasi pelaksana program dengan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan kelompok sasaran untuk meminta pelayanan program, ini mengacu pada realisasi pelayanan program bagi kelompok sasaran, seperti kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja, kegiatan gotong royong, belanja perlengkapan.
- c. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan berkesinambungan, dinamis, secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan keadilan. Program ADD merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi program pemerintah yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, program ADD ini sebagai suatu program tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai.

Adapun tujuan program ADD, sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis program ADD, yaitu:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan masyarakat sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Program ADD merupakan paket kegiatan yang bertujuan membantu pemerintah desa, yang mempunyai prinsip pengelolaan sebagai berikut, yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

### **3. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>55</sup> Dibagi untuk setiap desa secara proposional merupakan alokasi dana desa. Sedangkan pengelolaan keuangan ADD diatur dalam peraturan pemerintah menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2015 pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat (1) dan (2) pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>56</sup>

Pengelolaan ADD mengacu pada asas:

a. Asas Merata

Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM); dan

b. Asas Adil

---

<sup>55</sup>Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat 1 & 4.

<sup>56</sup>A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), h. 58.

Asas adil adalah besarnya ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional. Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% (empat puluh per persen) dari jumlah ADD.<sup>57</sup>

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastuktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

---

<sup>57</sup>Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 97 Ayat 2.

- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- f. Mendorong peningkatan pemberdayaan dan gotongroyong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>58</sup>

Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang tak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibuthkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.<sup>59</sup>

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima desa 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk biaya oprasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk

---

<sup>58</sup>Chabib soleh, Heru Rocmansjah, *Op.Cit.* h. 62.

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 16.



pemberdayaan masyarakat desa. Dari 30% (tiga puluh per seratus) alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD seperti: biaya operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Dari 70% (tujuh puluh per seratus) dipergunakan untuk masyarakat seperti: pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan pengurus utama gender, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa. BUMDesa, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan pada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Limnas dan sebagainya.<sup>60</sup>

Sedangkan mekanisme pencairan dana penyaluran alokasi dana desa yaitu:

- a. Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama adalah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan dasar hukum.

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 16.

- d. Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan dana (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
  - 2) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang di tandangani oleh kepala desa.
  - 3) Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada Bank yang ditunjuk.
  - 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam buku kas umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.<sup>61</sup>

## **D. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Kesejahteraan (*Falah*) dalam Ekonomi Islam**

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, 165.

*Al-falah* secara bahasa diambil dari kata dasar *falah* yang bermakna *zharafa bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *al-falah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun (23) ayat 1:

الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ ﴿١﴾ (Q.SAl-Mu'minun (23) ayat 1)

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman".<sup>62</sup>

Rasulullah SAW bersabda: Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid berkata, Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid dari Abu Al Khair dari Abdullah bin 'Amru; Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Islam manakah yang paling baik?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal". (H.R. Bukhari)<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Prof. Dr. Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah *al-falah* berarti : kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi (*komprehensif*) dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-qur'an dan Sunnah.

---

<sup>62</sup>Depertemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 342.

<sup>63</sup>Imam Bukhari, *Kitap Shahih Bukhari*, h. 15.

Dari pengertian di atas, maka *falah* bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik lahir dan batin, yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesungkan, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Anbiyya’(21) ayat 107 yang berbunyi:

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا (Q.SAl-Anbiyya’ayat 107)

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>64</sup>

Dari isi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungannya dengan Allah misalnya (*habl min Allah wa habl min an-nas*).Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal shaleh, yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi khalifah yang dilakukan nabi Adam As. Kesejahteraan sosial didambakan AL-Qur’an tercermin disurga yang dihuni

---

<sup>64</sup>Depertemen agama RI, *Op.Cit*, h. 331.

oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Masyarakat yang mewujudkan bayangan-bayangan surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, dan bahkan lingkungan. Hal ini sesuai kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam.<sup>65</sup>

Ayat tersebut jelas bahwa sandang, pangan, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan Masyarakat.

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atau usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika Faktor-faktor produksi tersebut di manfaatkan secara optimal maka pendapatan masyarakat dapat di tingkatkan.

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi utama menurut AL-Qur'an adalah alam dan kerja manusia produksi merupakan perpaduan harmonis

---

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 127.

antara alam dengan manusia.<sup>66</sup> Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari: Perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan Kesuburan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat seimbang. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw, melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain. kemudian lahir dari keluarga itu Abu Bakar Ash-Sidik r.a dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya. Sehingga pada akhirnya terbentuknya masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan masyarakat

- a. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak mungkin jiwa akan merasa ketenangan apabila kepribadian terpecah.
- b. Kesadaran bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, sekali usaha maksimal adalah pilihan terbaik yang selalu mengandung hikmah, karena itu Allah memerintahkan kepada manusia berusaha semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepadanya,
- c. Setiap pribadi bertanggungjawab untuk mensucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya, dan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan istrinya baik dari segi jasmani maupun

---

<sup>66</sup>Nasution, Mustafa Edwin, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana) h. 109.

rohani. Tentunya tanggungjawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan pendidikan.

- d. Menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk menghadapi masa depan, sebagian lain (yang tidak mereka nafkahkan itu) mereka tabung untuk menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, diri, dan keluarga.
- e. Kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, serta masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban tersebut sebagaimana halnya setiap kewajiban melahirkan hak-hak tertentu yang sifatnya adalah keserasian dan keseimbangan diantara keduanya. Sekali lagi kewajiban dan hak tersebut tidak terbatas pada bentuk penerimaan maupun penyerahan harta benda. Tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan.
- f. Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggotanya yang berpotensi.
- g. Setiap insan harus memperoleh perlindungan, jiwa, harta, dan kehormatannya. Jangankan membunuh, mengejek dengan sindiran halus, atau sebutan yang tidak senonoh, berprasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan, dan sebagainya. Semuanya dilarang dengan tegas, karena semua itu dapat menimbulkan rasa takut tidak aman,

maupun kecemasan yang mengantarkan kepada tidak terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang didambakan.<sup>67</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka kesejahteraan dalam padangan islam bukan hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material; seperti terpenuhinya kebutuhan spritual, terpeliharannya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera itu terpenuhinya dua kriteria: pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia.

Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan dapat di kendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sodakoh, dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti: sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi secara kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.

## **2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia,

---

<sup>67</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi mikro Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 129-133.



menghapuskan semua kesulitan dan ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.<sup>68</sup>

Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>69</sup>

Tujuan ekonomi Islam menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan manusia bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha dilakukan oleh manusia diletakan Allah pada timbangan kebaikan menurut teori Islam, kehidupan-kehidupan terbagi menjadi dua unsur materi dan spritual yang satu sama lain saling membutuhkan antara lain:

a. Unsur Materi

Kenikmatan yang disediakan Allah dibumi berupa rizki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan dunia ini secara wajar, islam memperbolehkan manusia memanfaatkan nikmat dunia dan batas-batas yang dihalal-Nya dan yang menjauhi yang haram. AL-Qur'an dan hadist menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik, beberapa kenikmatan dalam kehidupan

- 1) Nikmat makanan dan minuman yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-lain.
- 2) Nikmat pakaian dan perhiasan.

---

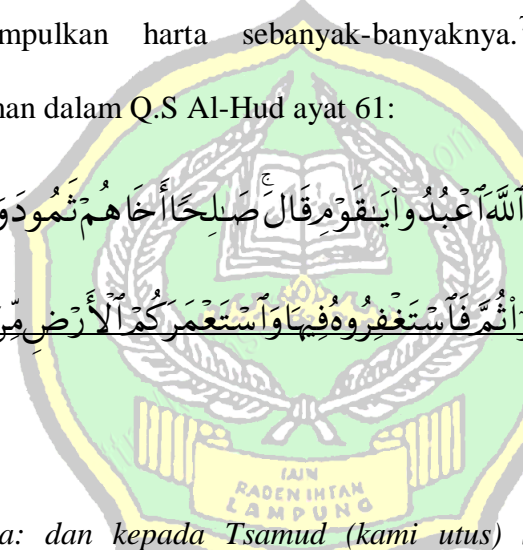
<sup>68</sup>*Ibid*, 2-1.

<sup>69</sup>*Ibid*, h. 10.

- 3) Nikmat tempat tinggal.
- 4) Nikmat kendaraan.
- 5) Nikmat rumah tangga.

b. Unsur Spiritual

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan terletak dikedamaian, kelapangan dada, dan ketenangan hati, jika manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesungguhnya, ia tidak akan memperoleh dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.<sup>70</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hud ayat 61:


  
 أَكْمُ هُوَ غَيْرُهُ إِلَهٍ مِّن لَّكُمْ مَا اللَّهُ عَبِدُوا وَيَقَوْمٍ قَالِ صَلِحًا أَخَاهُمْ تَمُودَ وَإِلَىٰ ﴿٦١﴾
  
مُجِيبٌ قَرِيبٌ رَبِّي إِنْ إِلَهٍ تُوْبُوْا ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوْهُ فِيهَا وَاسْتَغْمِرْكُمْ الْأَرْضِ مِّنْ أَنْشِ



*Artinya: dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."<sup>71</sup>*

## E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Pengertian Kesejahteraan

<sup>70</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 64

<sup>71</sup>Depertemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 228.

Kesejahteraan secara bahasa ‘aman, sentosa, dan makmur’. Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.<sup>72</sup> Kesejahteraan menurut ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.<sup>73</sup>

Menurut Kalle dalam bukunya *bintarto*, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>74</sup>

## 2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

---

<sup>72</sup>W.J.S Purwadinata, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan, 1996), 126.

<sup>73</sup>Undang-undang no 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 31.

<sup>74</sup>Bintaro, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2989), h.54.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>75</sup>

Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.<sup>76</sup>

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.<sup>77</sup>

Kesejahteraan sosial menurut UUD RI nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepirtual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.<sup>78</sup> Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, tersier. Adapun spritual untuk memenuhi kewajiban beragama serta mencari arti dan tujuan hidup. Permasalahan kesejahteraan

---

<sup>75</sup>Badrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN 2021), h. 146.

<sup>76</sup>Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

<sup>77</sup>Todaro P Michael, Smith C Stphen, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003, h. 19.

<sup>78</sup>*Ibid.*, h. 126.

sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain: (1) sosial ekonomi rumah tangga masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (seperdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yng mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal regional dan global.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materi dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spritual-ukhrowi.

### **3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-

indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

a. Bappenas

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bapennas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumahtangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

b. Biro Pusat Statistik

Menurut BPS ada 14 (empat belas) kriteria untuk menentukan keluarga dan rumahtangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500,00.- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak,

kapal, motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka dikatakan sebagai rumah tangga miskin tidak sejahtera.

Badan pusat statistik (BPS) menyebutkan tentang latar belakang informasi mengenai konsep dan istilah yang digunakan dalam statistik kesejahteraan sosial diantaranya adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, daerah perkotaan atau pedesaan, probabilitas bayi mati sebelum mencapai usia 1 tahun keluhan masyarakat terdapat kesehatan, imunisasi, pasien rawat inap, status gizi, narapidana, aksi dan korban kejahatan, luas lantai, mendengarkan radio, membaca koran/surat kabar, serta menonton televisi.

Dari beberapa devisi tentang indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan an kebutuhan lain yang bersifat material.

b. Komposisi Pengeluaran Pengeluaran

Pola kosumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini berkemabang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat

memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengidentifikasi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan kian lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan.

Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintahan bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai



tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus di lestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya.

Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Allah yang maha esa. Meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada individu masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pendidikan sebagai lembaga konserfatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) fungsi sosialisasi, (2) fungsi kontrol sosial, (3) fungsi pelestarian budaya, (4) fungsi reproduksi budaya, (8) fungsi difusi kultural, (9) fungsi peningkatan sosial, dan (10) fungsi modifikasi sosial.<sup>79</sup>

Menurut BPS pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: angka atau huruf, angket partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan semakin baik. Dan semakin rendah angka putus sekolah semakin baik dan keadaan suatu daerah dan sejahtera, karena distribusi bantuan pemerintah merata. Angka partisipasi sekolah

---

<sup>79</sup>Wujadji, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1988), h. 31-42

merupakan ukuran sumber daya sistem pendidikan terhadap usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, nilai presentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

d. Kesehatan

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut BPS:

- 1) Keluhan kesehatan
- 2) Proses kelahiran
- 3) Kelahiran
- 4) Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan
- 5) Imunisasi
- 6) ASI

- 7) Mengobati sendiri
- 8) Obat tradisional
- 9) Berobat jalan
- 10) Tidak termasuk dalam berobat jalan
- 11) Rawat inap

e. Perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut BPS:

- 1) Bangunan Fisik
- 2) Status Penguasaan Rumah

Dari pemikiran-pemikiran diatas maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan mampu membawa korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu pertumbuhan pembangunan harus fokus pada seluruh aset bangsa. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian kerja berkembang.

#### **4. Kiat-Kiat Mencapai Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah Program ADD, program ini adalah program yang dicanangkan oleh

Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Berikut beberapa langkah yang di tempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partispatif.
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat.



## **PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

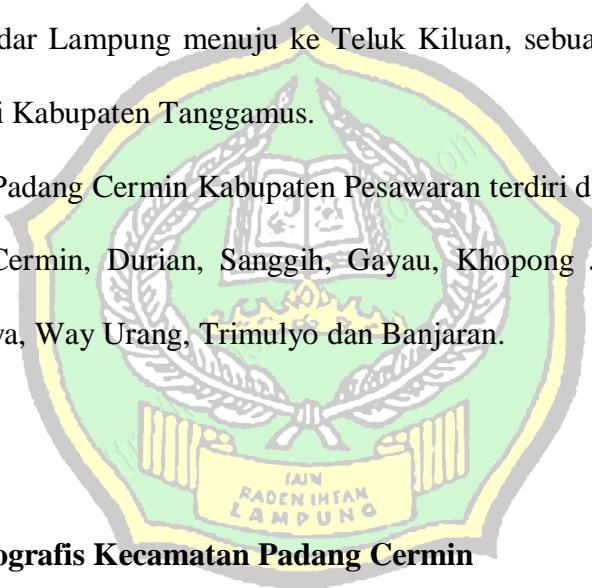
#### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Padang Cermin**

Kecamatan Padang Cermin terbentuk pada bulan September tahun 1920 dengan asistendemandang pertama yang bernama Muhammad Ali masuk ke Residensi Teluk Betung, setelah merdeka menjadi Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2007 Tanggal 12 Juli 2007 Kecamatan

Padang Cermin menjadi wilayah Kabupaten Pesawaran beribukota di Gedung Tataan, hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan.

Padang Cermin menjadi lokasi dari Markas Komando Brigade Infanteri 3/Marinir (Brigif 3/Mar), TNI Angkatan Laut. Nama kompleks di mana Brigif 3/Marinir bermarkas memiliki nama Bhumi Marinir Piabung. Di kecamatan ini juga terdapat beberapa objek wisata pantai, diantaranya Pantai Ringgung, Pantai Mutun, Pulau Tangkil dan Pantai Klara. Kecamatan ini juga menjadi jalan akses masuk dari Bandar Lampung menuju ke Teluk Kiluan, sebuah tujuan eko-wisata Lumba-lumba di Kabupaten Tanggamus.

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran terdiri dari 11 (sebelas) desa yaitu: Padang Cermin, Durian, Sanggih, Gayau, Khopong Jaya, Hanau Berak, Tambangan, Paya, Way Urang, Trimulyo dan Banjaran.



## **2. Kondisi Geografis Kecamatan Padang Cermin**

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang terletak pada koordinat  $104,92^0 - 105,34^0$  bujur timur, dan  $5,12^0 - 5,84^0$  lintas selatan. Secara administratif luas wilayah Kecamatan Padang Cermin adalah 12.838,5 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Kecamatan Teluk Pandan
2. Sebelah Utara : Kecamatan Way Ratai

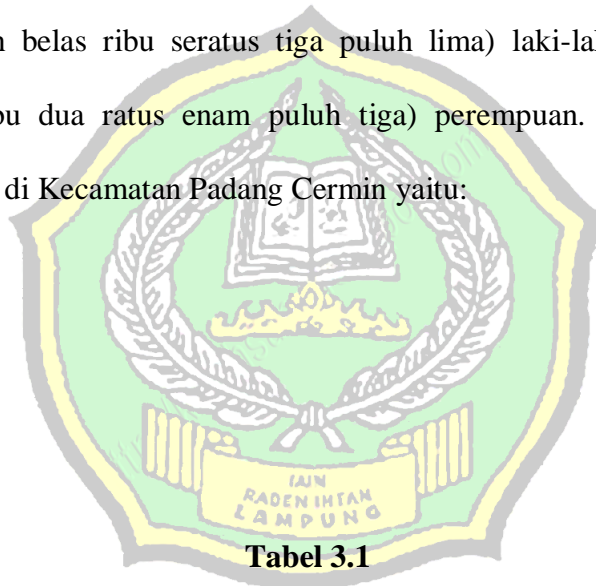
3. Sebelah Timur : Kecamatan Gedong Tataan

4. Sebelah Selatan : Kecamatan Punduh Pidada

### 3. Kondisi Demografis Kecamatan Padang Cermin

#### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Padang Cermin terdiri dari 39.101 (tiga puluh sembilan ribu seratus satu) jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 8.056 (delapan ribu lima puluh enam) KK yang terdiri dari 19.135 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh lima) laki-laki dan 20.263 (dua puluh ribu dua ratus enam puluh tiga) perempuan. Adapun desa yang termasuk di Kecamatan Padang Cermin yaitu:



**Tabel 3.1**

#### **Jumlah Penduduk Kecamatan Padang Cermin**

NO	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
			LK	PR	
1	Padang Cermin	2.494	7.300	8.460	15.760
2	Durian	652	1.170	1.232	2.402
3	Sanggih	879	1.518	1.832	3.350
4	Gayau	447	1.321	1.333	2.654

5	Khepong Jaya	447	732	773	1.505
6	Hanau Berak	617	1.400	1.300	2.700
7	Tambangan	273	720	880	1.600
8	Paya	282	540	433	973
9	Way Urang	516	978	925	1.903
10	Trimulyo	232	716	726	1.442
11	Banjaran	1.217	2.443	2.369	4.812
<b>Jumlah</b>		<b>8.056</b>	<b>18.838</b>	<b>20.263</b>	<b>39.101</b>

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Padang Cermin 2016

Presentase penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 48,18% (empat puluh delapan koma delapan satu persen) dan berjenis kelamin perempuan 51,82% (lima puluh satu koma delapan dua persen), hampir setara meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel 3.2 dibawah ini yaitu:

**Tabel 3.2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	18.838	48,18
2	Perempuan	20.263	51,82
<b>Jumlah</b>		<b>39.101</b>	<b>100</b>

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Padang Cermin 2016

b. Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Padang Cermin dapat dilihat di tabel 3.3 dibawah ini:

**Tabel 3.3**

**Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Presentase
1	Islam	96%
2	Katholik	3%
3	Hindu/budha	1%

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Padang Cermin 2016

Dari tabel diatas terlihat penduduk di Kecamatan Padang Cermin ini mayoritas beragama islam berkisar 96 % (sembilan puluh enam persen), agama khatolik 3% (tiga persen), dan Hindu/budha sebesar 1%(satu persen).

Berdasarkan keagamaan mayoritas penduduk kecamatan padang cermin beragama Islam, adapun fasilitas atau tempat ibadah berdasarkan agama atau keyakinan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah**

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	49
2	Langgar/Surau	40
3	Gereja	3
4	Pura	0
5	Wihara	0

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Padang Cermin 2016

c. Lembaga Pendidikan



Di Kecamatan Padang Cermin memiliki lembaga pendidikan sebanyak dari tingkat Paud, TK, SD, SMP, SMA, SMK, TPA, MI, MTS dan bahkan pondok pesantren pun aktif untuk desa ini dan memiliki lembaga pendidikan yang banyak yaitu 28 lembaga pendidikan. Sedangkan di desa Durian, Sanggih, Gayau, Khepong Jaya, Hanau Berak, Tambangan, Paya, Way Urang, Trimulyo Dan Banjaran memiliki fasilitas sarana pendidikan yang memadai walaupun tidak sebanyak di desa Padang Cermin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Berdasarkan Lembaga Pendidikan**

NO	DESA	TPA	PAUD	PESANTREN	TK	SD	SMP	SMA	SMK	MTS	MA
1	Padang Cermin	10	2	1	2	7	2	1	1	1	1
2	Durian	2	1			2					
3	Sanggih	6	3	2	1	1					
4	Gayau	2	1	1	1	1					
5	Khepong Jaya	2	1			1					
6	Hanau Berak	8	2			3					
7	Tambangan	2	1			1					
8	Paya	3	1			1					
9	Way Urang	7	1			1	1				
10	Trimulyo	2	1			1			1		
11	Banjaran	9	2		1	3					
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Padang Cermin 2016

d. Sarana Kesehatan

Di Kecamatan Padang Cermin sarana kesehatan di setiap desa kurang memadai, terbukti hanya ada 5 puskesmas dari 11 desa untuk pertolongan pertama masyarakat. Dan hanya ada 1 puskesmas di Kecamatan Padang

Cermin. Adapun sarana kesehatan di kecamatan Padang Cermin dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini.

**Tabel 3.6**  
**Sarana Kesehatan**

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Puskesdes	5

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Padang Cermin 2016

e. Kondisi Perumahan

Data kondisi rumah di Kecamatan Padang Cermin Sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Kondisi Rumah**

Klasifikasi	Jumlah
Premanen	60%
Semi premanen	27%
Non premanen	13%

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Padang Cermin 2016

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa kondisi rumah masyarakat Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran terdiri dari 3 klasifikasi yaitu rumah premanen, semi premanen, dan non permanen. Rumah permanen yaitu rumah yang memiliki ciri dinding bangunannya dari tembok, berlantai semen atau kramik, dan atapnya berbahan genteng. Sedangkan rumah semi premanen yaitu rumah yang memiliki ciri dindingnya setengah tembok atau setengah bambu, lantainya semen,

atapnya terbuat dari gentang seng ataupun asbes. Rumah non permanen memiliki ciri rumah berdinding kayu, bambu atau gedek, dan tidak berlantai (tanah), atas rumahnya dari seng maupun asbes.

Kondisi rumah masyarakat di Kecamatan Padang Cermin terdiri dari rumah permanen sebesar 60% (enam puluh per seratus), semi permanen sebesar 27% (dua puluh tujuh per seratus) dan rumah non permanen sebesar 13% (tiga belas per seratus).

f. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran di dominasi pada sektor pertanian 70% (tujuh puluh persen), dan lainnya nelayan, pedagang, wiraswasta, PNS dan pensiunan sebesar 30% (tiga puluh persen). Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin adalah petani kakau, baik sawah maupun kebun belum di manfaatkan secara optimal membuat produksi pertanian belum meningkat.

Sedangkan masyarakat yang menjadi buruh tani hanya mendapat penghasilan perhari antara Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)-Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dibidang ekonomi, masih sedikitnya lembaga perekonomian di wilayah Kecamatan Padang Cermin yang terkait seperti: perdagangan, jasa dan industri kecil, atau UMKM, yang kurangnya kegiatan pembinaan kepada masyarakat. Perlunya upaya dalam usaha-usaha untuk jasa, perdagangan, industri kecil dan menengah di hadapkan

dan dikembangkan lebih lanjut untuk menggerakkan roda perekonomian khususnya di Kecamatan Padang Cermin. Lebih jelasnya dapat dilihat kondisi perekonomian masyarakat pada tabel 3.8.

**Tabel 3.8**  
**Kondisi Perekonomian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Presentase
1	Petani	40
2	Buruh tani	30
3	Pedagang, wira swasta	17
4	PNS	13
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

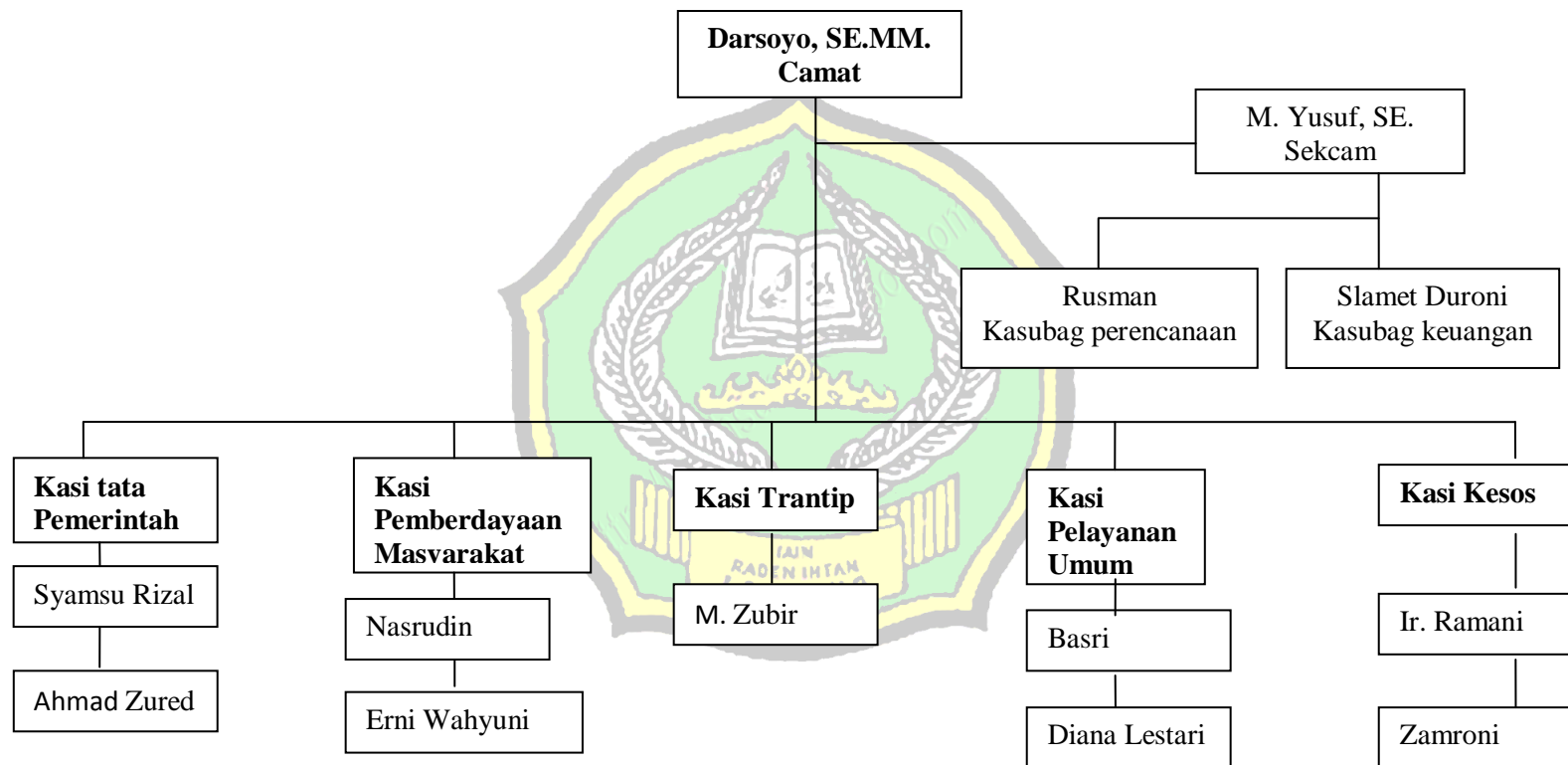
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Padang Cermin 2016

#### **4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Padang Cermin**

Dalam setiap pemerintahan yang baik, harus ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab, agar setiap tugas baik pemimpin maupun pekerja dapat mengetahui dengan jelas yang menjadi tugasnya. Dengan adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga terjadi koordinasi antara petugas satu dengan yang lainnya akan terlaksana dengan baik. Penentuan tugas dan tanggungjawab ini dapat diketahui melalui struktur organisasi.

Adapun struktur pemerintahan Kecamatan Padang Cermin dapat dilihat dari tabel 3.9:

**Tabel 3.9**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Padang Cermin 2016**



## **B. Kondisi Masyarakat di Kecamatan Padang Cermin**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapainya kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

### **1. Tingkat pendidikan masyarakat**

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat di peroleh melalui lembaga-lembaga pendidikan forman maupun non formal.

Masyarakat Kecamatan Padang Cermin jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, bahkan ada juga yang melanjutkan kejenjang SMA, dan strata satu (S1). Tetapi hampir dari masyarakat Kecamatan Padang Cermin berpendidikan SMA. Faktor anak sekolah dikarenakan para orang tua tidak menganjurkan dan juga tidak ada keinginan dari anak untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, mereka hanya cepat-cepat mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga.

**Tabel 3.10**

**Tingkat Pendidikan Masyarakat 2016**

No	Keterangan	Jumlah dalam %
1	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	0
2	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	2
3	Penduduk tamat SD/ sederajat	20
4	Penduduk tamat SMP/ sederajat	25
5	Penduduk tamat SMA/ sederajat	46
6	Penduduk tamat D-3	4
7	Penduduk tamat S-1	2
8	Penduduk tamat S-2	1
	Total	100

Sumber: Kesimpulan wawancara kepala desa Kecamatan Padang Cermin

Tingginya warga yang berlatar belakang SMA atau sederajat, membuat pengetahuan masyarakat mengetahui pentingnya pendidikan. Akan tetapi berpenghasilan rendah membuat warga takut untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Warga yang berpendidikan S1 diantaranya adalah anak-anak yang memiliki perkebunan luas dan pemilik kebun coklat, PNS didinas pendidikan atau guru SD.

## 2. Tingkat kesehatan masyarakat

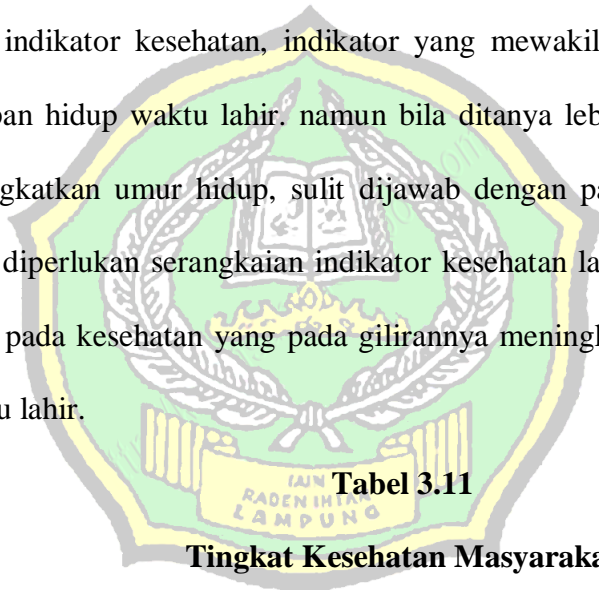
Kesehatan yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia antara nagara dalam *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari : indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).

Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi:

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum perkiraan kalori dan protein yaitu 2100kk11/hari.
- 2) Sandang, dinyatakan dengan idikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
- 3) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter dan perawat.

Untuk indikator kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM adalah umur harapan hidup waktu lahir. namun bila ditanya lebih lanjut, bagaimana cara meningkatkan umur hidup, sulit dijawab dengan pasti. Oleh karena itu tampaknya diperlukan serangkaian indikator kesehatan lain yang diperkirakan berdampak pada kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan umur harapan hidup waktu lahir.



**Tabel 3.11**

**Tingkat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator	Tahun 2016
1	Angka kematian bayi	1%
2	Angka kematian ibu	0
3	Angka harapan hidup	4%
4	Presentase persalinan oleh tangan medis	95%

Sumber: Kesimpulan wawancara kepala desa Kecamatan Padang Cermin

Tabel diatas menunjukan bahwa meningkatnya taraf kesehatan masyarakat Padang Cermin. Hal ini ditegaskan oleh seorang tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan



kekurangan cukup gizi atau kematian bayi dan ibu hamil, hal ini disebabkan hampir seluruh masyarakat Padang Cermin dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi.

Dalam proses kelahiran penduduk Kecamatan Padang Cermin sudah sedikit menggunakan tabib (dukun bayi), penduduk sudah beralih ke bidan, dan mudahnya akses jalan menuju puskesmas atau puskesmasdes, masyarakat yang sudah mengikuti kemajuan zaman serta mudahnya mengakses jaringan internet untuk mengetahui informasi tentang kesehatan.

### 3. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari kepala rumah tangga ataupun pendapatan anggota rumah tangga. penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan seperti: pangan, kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun pendidikan serta kebutuhan lainnya yang bersifat material.

Masyarakat Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dikarenakan di Kecamatan Padang Cermin memiliki lahan yang luas serta tanah yang subur untuk bercocok tanam, sebagian besar masyarakat menanam kacang sebagai sumber pendapatan.

Adapun besaran pendapatan masyarakat Kecamatan Padang Cermin menurut profesi sebagai berikut:

**Tabel 3.12**

### **Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2015**

<b>NO</b>	<b>Jenis Profesi</b>	<b>Pendapatan Perbulan</b>
1	Petani	Rp.1.000.000-Rp.1.500.000
2	Buruh	Rp.500.000-Rp.1.000.000
3	Pedagang	Rp.700.000-Rp.1.800.000

Sumber: Wawancara kepala desa Kecamatan Padang Cermin 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pendapatan masyarakat dengan pengelolaan alokasi dana desa tahun 2015. Pendapatan masyarakat tetap tidak mengalami perubahan secara signifikan sekalipun ADD tiap tahun bertambah.

**Tabel 3.13**

### **Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>Jenis Profesi</b>	<b>Pendapatan Perbulan</b>
1	Petani	Rp.1.000.000-Rp.1.800.000
2	Buruh	Rp.500.000-Rp.1.500.000
3	Pedagang	Rp. 500.000-Rp.1.900.000

Sumber: Wawancara kepala desa Kecamatan Padang Cermin 2016

Dari kedua tabel diatas terlihat bahwa kenaikan pendapatan penduduk di Kecamatan Padang Cermin tidak mengalami Peningkatan yang besar, ini menunjukkan alokasi dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kecamatan Padang Cermin, kurang baik dalam pembuatan program dan pengelolaannya.

#### 4. Komposisi Pengeluaran Masyarakat

Pengeluaran dilakukan untuk kebutuhan hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi pada umumnya dibelanjakan untuk

kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan barang utama untuk kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai barang konsumsi (termasuk sadang, perumahan bahan bakar, dan sebagainya), yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung kepada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Hasil kesimpulan wawancara penulis dengan kepala desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, kebutuhan konsumsi setiap hari tidak selalu sama. Penghasilan tidak menentu menjadi salah satu faktor berapa porsi pengeluaran perharinya. Jika pendapatan masyarakat tinggi maka konsumsi masyarakat akan tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan masyarakat sedikit maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran untuk konsumsi berkisar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari. Ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan, pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan sebagainya.

Menurut perhatian biro pusat statistik konsumsi masyarakat meliputi seluruh pengeluaran rumah tangga baik makanan, pendidikan, kesehatan maupun perumahan. Berikut ini merupakan tabel pola konsumsi masyarakat Kecamatan Padang Cermin.

**Tabel 3.14**

### Pola Konsumsi Tahun 2016

NO	Pola Konsumsi	Pengeluaran Perbulan
1	Pengeluaran makanan	Rp.800.000
2	Pengeluaran pendidikan	Rp.500.000
3	Pengeluaran kesehatan	Rp.200.000
<b>Total Pengeluaran</b>		<b>Rp. 1.500.000</b>

Sumber: Hasil Kesimpulan wawancara kepala desa Padang Cermin 2016

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran konsumsi makanan masih lebih besar dibandingkan konsumsi perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sehingga masyarakat Kecamatan Padang Cermin harus mencari pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatan.

#### 5. Tingkat Perumahan Masyarakat

Menurut WHO, rumah atau struktur fisik bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Sedangkan perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik, misalnya penyediaan air bersih, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Permukiman sering disebut perumahan dan

atau sebaliknya, perumahan memberi kesan tentang rumah beserta sarana dan rasaran lingkungannya.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perumahan merupakan suatu lingkungan untuk tempat tinggal, struktur fisik, atau bangunan untuk berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial maupun politik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

**Tabel 3.15**  
**Tingkat Perumahan Masyarakat Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>Jenis Profesi</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>
1	Kepemilikan rumah	Hak Milik	Hak Milik
2	Jumlah rumah per/KK	8.053	8.056
3	Rumah berkualitas baik	60%	75%
4	Rumah tangga mempunyai penerangan listrik	85%	90%
5	Rumah tangga mempunya MCK yang baik	50%	60%

Sumber: Hasil Kesimpulan wawancara kepala desa Padang Cermin 2016

Dari tabel diatas jelas menunjukan bahwa program alokasi dana desa berdampak positif jika dilihat dari jumlah jumlah rumah berkuliatas baik yaitu naik sebesar15%, sedangkan jika dilihat dari tingkat penerangan listrik naik sebesar 5%, tetapi belum berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari fasilitas MCK yang belum cukup memadai.

### **C. Program dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diKecamatan Padang Cermin**

1. Pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin ini dikelola langsung oleh aparatur desa, kepala desa sebagai penanggungjawab program, sedangkan sekertaris desa sebagai ketua pelaksanaan program untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan program serta pengelolaan di masing-masing desa:

1) Padang Cermin

Luas wilayah di desa Padang Cermin 3.298 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan) Ha, dengan kepala desa bapak Ibrohim, terdiri dari 10 (sepuluh) dusun dan 44 (empat puluh empat) RT, jumlah penduduk 15.760 (lima belas ribu tujuh ratus enam puluh) jiwa, dan 2.494 (dua ribu empat ratus sembilan puluh empat) KK. Desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 259.315.736 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu tuju ratus tiga puluh enam rupiah).

Proses penentuan program ADD di desa Padang Cermin ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiayai program-program yaitu: pembangunan drainase 68 M dan gorong-gorong, pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban,

kegiatan fungsi aperatur pemerintah dan kegiatan sosialisasi susunan organisasi dana tata kerja sebesar Rp.103.331.000 atau sebesar 39%, Belanja pegawai sebesar Rp.155.589.442 atau sebesar 60%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Padang Cermin dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

## 2) Desa Durian

Luas wilayah di desa Durian 987 Ha, dengan kepala desa bapak Ir. Yamani, terdiri dari 4 dusun dan 15 RT, jumlah penduduk 2.402 jiwa, dan 652 KK, desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp.233.302.355.

Proses penentuan program ADD di desa Durian ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp.139.981.398 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong Tegal Arum, pembangunan rebet beton dusun Durian, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan

pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp87.383.000 atau sebesar 37%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Durian dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

### 3) Sanggih

Luas wilayah di desa Sanggih 998.5 Ha, dengan kepala desa bapak M.Maulana, terdiri dari 3 dusun dan 14 RT, jumlah penduduk 3.350 jiwa, dan 879 KK, desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp.232.953.054.

Proses penentuan program ADD di desa Sanggih ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai, tunjangan oprasional, oprasional perkantoran dan listrik sebesar Rp.223.189.787 atau sebesar 95%, pembangunan gorong-gorong Rp.13.537.300 atau sebesar 5%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Sanggih dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.



#### 4) Gayau

Luas wilayah di desa Gayau 732 Ha, dengan kepala desa bapak Agustinus Srinarimo, terdiri dari 5 dusun dan 14 RT, jumlah penduduk 2.654 jiwa, dan 447 KK. Desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 228.385.667.

Proses penentuan program ADD di desa Gayau ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai dan biaya listrik serta pergantian ban dinas sebesar Rp.160.671.397 atau sebesar 70%, belanja modal, pembangunan TPT Gubang Gajah sebesar, ketentraman dan ketertiban, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga, kegiatan pelatihan peningkatan kinerja kader posyandu sebesar Rp.58.836.500 atau sebesar 26%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Gayau dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

#### 5) Khepong Jaya

Luas wilayah di desa Khepong Jaya 843 Ha, dengan kepala desa bapak Rustam Efendi, terdiri dari 5 dusun dan 6 RT, jumlah penduduk 1.505 jiwa, dan 447 KK. Desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 230.947.560.

Proses penentuan program ADD di desa Khepong Jaya ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai, ganti ban motor dinas, administrasi dan pelaporan Rp.140.368.536 atau sebesar 60%, belanja modal, pembangunan rebet beton, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembiayaan keamanan dan ketertiban, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, kegiatan penguatan fungsi aperatur desa, dan kegitan PKK sebesar Rp.96.367.000 atau sebesar 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Khepong Jaya dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

6) Hanau Berak

Luas wilayah di desa Hanu Berak 1.321 Ha, dengan kepala desa bapak Mirza Gulam Ahmad, terdiri dari 8 dusun dan 13 RT, jumlah penduduk

2.700 jiwa, dan 617 KK. Desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 232.767.601.

Proses penentuan program ADD di desa Hanau Berak ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai sebesar Rp.139.660.561 atau sebesar 60%, tunjangan oprasional, PKK, LPM dan penyelenggaraan perencanaan desa, pembangunan air bersih, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembiayaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp.83.590.310 atau sebesar 35%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Hanau Berak dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

#### 7) Tambangan

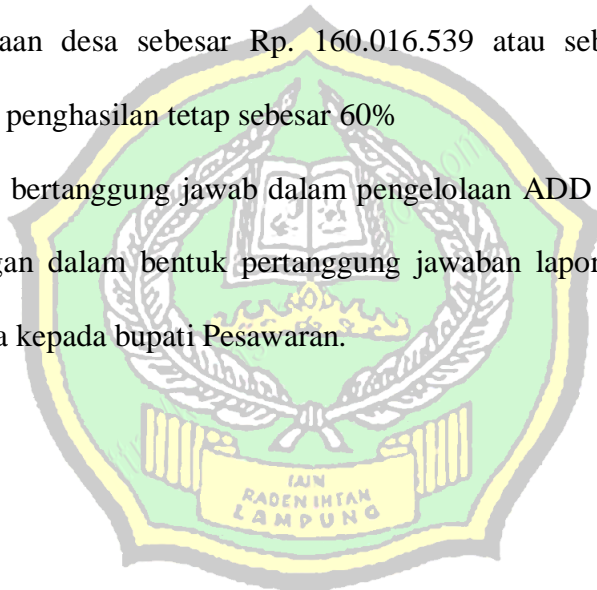
Luas wilayah di desa Tambangan 743 Ha, dengan kepala desa bapak Antoni, terdiri dari 7 dusun dan 7 RT, jumlah penduduk 1.600 jiwa, dan 273 KK. Desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp.228.597.056.

Proses penentuan program ADD di desa Tambangan ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam

menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk ke rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk tunjangan operasional BPD, operasional RT dan RW dan tunjangan kepala desa, perencanaan desa dan perangkat sebesar Rp.68.576.516 atau sebesar 30%, PKK dan LPM, belanja modal, dan perencanaan desa sebesar Rp. 160.016.539 atau sebesar 70%, desa ini memiliki penghasilan tetap sebesar 60%

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Tambangan dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.



#### 8) Paya

Luas wilayah di desa Paya 723 Ha, dengan kepala desa ibu Maryana, terdiri dari 4 dusun dan 4 RT, jumlah penduduk 973 jiwa, dan 282 KK. Desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp.235.435.896.

Proses penentuan program ADD di desa Paya ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di

musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai sebesar Rp.141.261.547 atau sebesar 60%, belanja modal, pembangunan Gorongdan Pembangunan TPT Paya Induk sebesar Rp.81.155.000 atau sebesar 33%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Paya dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

#### 9) Way Urang

Luas wilayah di desa Paya 1.026 Ha, dengan kepala desa Mad Ali, terdiri dari 4 dusun dan 4 RT, jumlah penduduk 1.903 jiwa, dan 516 KK. Desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp.227.767.654.

Proses penentuan program ADD di desa Way Urang ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai,tunjangan kepal desa dan perangkat sebesar Rp.56.941.913 atau sebesar 25%, belanja modal, PKK

dan LPM, serta penyelenggaraan kegiatan Rp.170.825.700 atau sebesar 75%, serta penghasilan tetap sebesar 20%

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Way Urang dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

#### 10) Trimulyo

Luas wilayah di desa Trimulyo 613 Ha, dengan kepala desa bapak Tasman, terdiri dari 2 dusun dan 4 RT, jumlah penduduk 1.442 jiwa, dan 232 KK. Desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp.226.530.203.

Proses penentuan program ADD di desa Trimulyo ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk pembangunan fisik dan kegiatan ekonomi desa 80%, sedangkan untuk 20% untuk belanja pegawai dan oprasional BPD dan oprasional RT, RW.. Serta memiliki penghasilan tetap sebesar 23%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Trimulyo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

#### 11) Banjaran

Luas wilayah di desa Banjaran 1.560 Ha, terdiri dari 6 dusun dan 26 RT, jumlah penduduk 4.812 jiwa, dan 1.217 KK. Desa ini tahun 2016 mendapat besaran ADD sebesar Rp.234.274.745.

Proses penentuan program ADD di desa Banjaran ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawahkan serta di susun, dan dana sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai tujangan kesehatan, pakaian olah raga, dan kesehatan sebanyak Rp.160.364.8082 atau sebesar 68%, dan hanya Rp74.967.918 atau 32% untuk PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Paya dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Pelaksanaan Program ADD2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan di bagi untuk setiap desa secara propesional.

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Pengelolaan ADD pengaju pada asas:



- a. Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
- b. Asas adil adalah besarnya alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana profesional. Besarnya presentase perbandingan atas asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besaran ADDP adalah 40 % (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.<sup>80</sup>

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis di ketahui bahwa besaran alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin di setiap desanya tahun 2016 berkisar antara Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) s/d Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun, sudah termasuk anggaran untuk aperatur desa, yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Sedangkan program untuk penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten yaitu untuk pembangunan, gorong-gorong, pembangunan rabat beton, drainase, Pembangunan TPT Gebang Gajah, untuk bantuan oprasional lembaga kemasyarakatan kegiatan pembinaan kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, kelompok tani, belanja pegawai, biaya

---

<sup>80</sup>Lihat Bab II, hal. 41.

musyawarah, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk oprasional desa yaitu alat tulis, perlengkapan kantor lainnya, dan hanya ada 4 desa dari 11 desa yang programnya untuk pemberdayaan ekonomi yaitu desa Durian, Khepong Jaya, Tambangan, Way Urang, namun belum terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Padang Cermin ini program dan pengalokasian dana desa masing-masing desa hanya berfokus pada pembangunan balai desa dan gorong-gorong dan tunjangan untuk aperatur desa, sedangkan prasarana yang lain belum tersentuh seperti pembangunan *sanitasi* (prilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih), yang lebih dibutuhkan masyarakat belum ditangani dengan baik walaupun sudah ada di desa Tambangan yang membangun wadah air bersih, tetapi itu pun masih sangat jauh dari kata mencukupi untuk kebutuhan masyarakat karena terkendala dengan dana ADD yang minim.

Selain terkendala dengan dana ADD yang kurang, dana yang diperoleh hanya di fokuskan untuk oprasional desa, belanja aperatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini untuk belanja aperatur desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari persentasi penggunaan alokasi dana desa antara 35%-45%, seperti desa Padang Cermin 40%.

Dan diantara 11 desa di Kecamatan Padang Cermin yang paling baik diantara desa yang lain yaitu desa Tambangan, karena selain baik secara administratif maupun pengelolaan di lapangan, baik pula dalam pembagian alokasi dana desa untuk masing-masing pos, seperti pembangunan fisik, bantuan lembaga masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun oprasional desa sudah

sesuai dengan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Yang memiliki program pemberdayaan masyarakat yaitu di 7 desa yaitu: Hanu Berak, Padang Cermin, Durian, Khepong Jaya, Tambangan, Way Urang, dan Banjaran sedangkan di 4 desa yaitu: Sanggih, Gayau, Paya, dan Trimulyo ADD hanya digunakan untuk pembangunan fisik, belanja oprasional desa dan BPD. Sedangkan berdasarkan UU no 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan dari program ADD adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
- 4) Meningkatkan pengamalan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong toyong masyarakat.
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>81</sup>

Akan tetapi jika dilihat dari pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin, tujuan program alokasi dana desa ini belum tersentuh secara menyeluruh. Dari tujuan ADD yang baru dirasakan oleh masyarakat yaitu pembangunan insfrastruktur desa, dan peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial, ini terlihat dari program-program di desa yang di alokasikan

---

<sup>81</sup>Lihat Bab II, hal. 41

untuk ibu-ibu PKK yang digunakan untuk pengajian seperti desa Tambangan, Khepong Jaya, Hanau Berak, dan Way Urang. Untuk pembangunan infrastrukturnya yaitu Padang Cermin, Durian, Sanggih, Gayau, Khepong Jaya, Hanau Berak, Tambangan, Paya, dan Trimulyo. Peningkatan pendapatan desanya yaitu Tambangan, Way Urang dan Trimulyo.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa tujuan dari program alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin ini yang dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan insfrastruktur, dan peningkatan pengamalan nilai-nilai kegaamaan sosial budaya. Sedangkan peningkatan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, karena terkendalanya dana yang kurang dan ketidak sesuaian program yang di susun oleh pemerintahan desa setempat. Aperatur desa belum memprioritaskan kegiatan ekonomi produktif sebagai salah satu program dari alokasi dana desa, aperatur desa lebih memprioritaskan pembangunan gorong-gorong dan sinitasi air bersih yang sangat kurang sehingga itu menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

## **B. Dampak ADD 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang di adakan dan di susun oleh pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatan sejahtera atau tidak sebagai indikator-indikatornya

yaitu: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam program ADD. Maka berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat dari tabel 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4.1 Indikator Kesejahteraan Sebelum ada ADD tahun 2016 dan Sesudah ada ADD**

<b>Indikator</b>	<b>Sebelum ada ADD tahun 2016</b>	<b>ADD tahun 2016</b>	<b>Keterangan</b>
Tingkat pendidikan	50%	50%	Tidak mengalami peningkatan
Tingkat kesehatan	Persalinan medis 95%	95%	Tidak mengalami peningkatan
Tingkat pendapatan masyarakat	Rp.1.000.000-1.500.000	Rp.1.000.000-1.800.000	Mengalami peningkatan
Pengeluaran masyarakat	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Tidak mengalami peningkatan
Tingkat perumahan	60%	75%	Ada peningkatan 15%
Infrastruktur gorong-gorong	45 %	90%	Mengalami peningkatan 45%

Sumber: Data primer (diatas), 2016.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan

tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan tidak memerlukan bantuan orang lain.

Masyarakat Kecamatan Padang Cermin jika ditinjau dari latarbelakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar sembilan tahun, bahkan ada masyarakat yang meneruskan kejenjang SMA, dan S1. Tetapi hampir 50% masyarakat Kecamatan Padang Cermin berpendidikan SMA.

Dampak adanya program ADD di Kecamatan Padang Cermin pada bidang pendidikan belum dapat di rasakan oleh masyarakat sekitar, dikarenakan pengalokasian dana tersebut belum dialokasikan ke pendidikan.

Sekalipun program ADD tersebut belum dirasakan langsung oleh masyarakat namun tidak menjadikan masyarakat putus sekolah karena adanya bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu yang diberikan oleh pemerintah.

## 2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan kesehatan sehari-hari.

Dari program alokasi dana desa untuk kesehatan yaitu pembuatan gorong-gorong dan sinitasi air bersih yang dilakukan di desa Padang Cermin, Durian, Sanggih, Gayau, Khepong Jaya, Hanau Berak, Tambangan, Paya, dan Trimulyodi Kecamatan Padang Cermin dengan pembuatan gorong-gorong

tersebut sanitasi kesehatan akan lebih sehat dan telah mensejahterakan masyarakat di tingkat kesehatan.

Masyarakat Kecamatan Padang Cermin dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makan yang di konsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga Masyarakat Kecamatan Padang Cermin dalam penanganan ibu melahirkan sudah sangat sedikit menggunakan tabib atau dukun bayi, sehingga angka kematian dan ibu melahirkan tidak ada.

Masyarakat Kecamatan Padang Cermin yang memiliki masalah kesehatan lebih memilih berobat ke puskesmas, puskesmas dan bidan. Serta pola makanan dan kebutuhan kalori juga terpenuhi dengan baik sehingga jarang ada warga yang sakit karena kekurangan asupan makanan.

### 3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang bersal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Menurut Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang (SKPMP) 2016 tingkat pendapatan perbulan dikatan sejahtera adalah lebih dari Rp.500.000.

Adanya ADD ini tidak memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, ini karena program ADD serta pengelolaan di Kecamatan Padang Cermin kurang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat, di Kecamatan Padang Cermin ini yang menggunakan untuk kegiatan

pemberdayaan yaitu: desa Durian, Khepong Jaya, Tambangan dan Way Urang, Hanau Berak, dan Banjaran, yang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa kelompok tani, kerajinan tangan oleh ibu PKK namun pengelolaanya belum dikelola dengan baik sehingga secara ekonomi belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Seharusnya dari program ADD digunakan untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pembuatan industri rumah tangga kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### 4. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumahtangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makan pada seluruh pengeluaran rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga sejahtera bila presentase pengeluaran makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan atau <80% dari pendapatan.

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu karena masyarakat di Kecamatan Padang Cermin mayoritas petani yang mengandalkan musim panen. Namun jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka semakin sedikit, maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran konsumsi berkisar Rp.20.000-30.000 perhari. Ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan



perumahan serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

#### 5. Tingkat Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10m<sup>2</sup> dan bagian terluas rumah bukan tanah, dan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

Bentuk bangunan rumah masyarakat Kecamatan Padang Cermin sebesar 60% permanen, 27% semi permanen atau masih berbentuk rumah adat, 13% adalah dalam keadaan non permanen, dan seluruh status kepemilikan adalah milik sendiri. Sedangkan MCK warga juga 60% yang memiliki sanitasi yang baik selebihnya hanya MCK seadanya. Kondisi sumber air bersih juga kurang sekalipun sudah ada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tetapi masih belum mencukupi kebutuhan warga, ini terlihat dari pasokan air mengalir untuk warga setiap kampung berbeda-beda. Keadaan penerangan 90% warga sudah menggunakan listrik, dan sekitar 10% warga belum memiliki KWH sendiri.

Apabila dilihat dari indikator perumahan, warga belum dikatakan sejahtera karena luas bangunan belum memenuhi kategori sejahtera. Beberapa indikator yang telah dijelaskan, telah menunjukkan bahwa ADD berdampak positif bagi masyarakat sekitar seperti tidak harus menggunakan air sungai lagi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sekalipun belum dapat memenuhi 100% kebutuhan air bersih.

Jika dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, beberapa indikator kesejahteraan ini belum terpenuhi dengan baik, oleh program alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin, hanya indikator tingkat kesehatan yang mengalami peningkatan cukup baik dari program alokasi dana desa ini seperti sudah ada program untuk saluran sanitasi dan pembuatan gorong-gorong sehingga masalah saluran sanitasi menjadi lebih baik dan lebih sehat. Dan tingkat pendidikan masyarakat belum terlihat dampak positif dari program alokasi dana desa, karena program yang berhubungan dengan pendidikan belum menyentuh masyarakat, sekalipun tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Padang Cermin hampir 50% yang lulus SMA bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi. Itu bukan karena program yang ada di Kecamatan Padang Cermin namun karena bantuan Pendidikan di yang digalakan oleh Kabupaten Pesawaran.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendapatan masih belum dapat dikatakan sejahtera, oleh karena itu peran pengelolaan alokasi dana desa yang tepat sangat di nantikan oleh masyarakat demi perubahan kondisi ekonomi sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat.

### **C. Pelaksanaan serta Dampak Program ADD 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu pun dengan perencanaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. Ar-Ra'd:11):

*Artinya: ....., Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.....*<sup>82</sup>

Pelaksanaan dan dampak program alokasi dana desa 2016 di Kecamatan Padang Cermin dalam perspektif Ekonomi Islam tidak sesuai dengan QS. Ar-Ra'd ayat 11. Serta tidak menggunakan asas adil dalam pembagain porporasi ADD 2016 di Kecamatan Padang Cerminkarena terkendala dengan dana ADD yang minim. Selain terkendala dengan dana ADD yang kurang, dana yang diperoleh hanya di fokuskan pembangunan fisik, untuk oprasional desa, belanja aperatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini untuk belanja aperatur desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari persentasi penggunaan alokasi dana desa antara 35%-45%, seperti desa Padang Cermin 40%. Selain terkendala dengan dana ADD, dana yang diperoleh hanya di fokuskan pembangunan gorong-gorong yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin. Namun ada beberapa desa yang mengalokasikan dengan baik yaitu desa Tambangan dan Way urang.

---

<sup>82</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Jamanatul 'AliAl-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004), h. 350.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengolahan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada pelaksanaan program alokasi dana desa tahun 2016 di Kecamatan Padang Cermin dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Padang Cermin ini ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya dikarenakan pembagian proporsi untuk masing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif yaitu desa Padang Cermin, Durian, Sanggih, Gayau, Paya, Hanu Berak, Banjaran, Khepong Jaya dan Trimulyo sedangkan desa yang pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu desa Tambangan dan Way Urang. Di Kecamatan Padang Cermin ini pengelolaan yang paling baik yaitu desa Tambangan itu terlihat dari proporsi pembagian ADD untuk masing-masing pos seperti untuk pembangunan fisik, bantuan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ataupun untuk oprasional kampung sudah sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya.
2. Dampak program ADD terhadap kesejahteraan di kecamatan Padang Cermin jika dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, dan tingkat perumahan masyarakat di antara 11 desa di Kecamatan Padang Cermin,

hanya ada 5 desa yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif, yaitu desa Bajaran, Way Urang, Tambangan, Hanu Berak dan Khepong Jaya yang secara pelaksanaannya juga belum dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, sedangkan kampung yang lain yaitu desa Padang Cermin, Durian, Sanggih, Gayau, Paya, dan Trimulyo hanya menggunakan program ADD untuk kegiatan pembangunan gorong-gorong. Dari uraian tersebut dampak ADD di Kecamatan Padang Cermin berdampak positif di bidang infrastruktur khususnya pembuatan gorong-gorong. Dan jika dilihat dari perencanaan ADD tahun 2016 mendapat dana ADD yang cukup besar dari tahun sebelumnya namun masalah ekonomi produktif belum dapat tersentuh dengan baik karena aparat desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan gorong-gorong yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

3. Pelaksanaan dan dampak program alokasi dana desa tahun 2016 di Kecamatan Padang Cermin dalam perspektif Ekonomi Islam tidak sesuai dengan QS. Ar-Ra'd ayat 11. Serta tidak menggunakan asas adil dalam pembagian porsi ADD 2016 di Kecamatan Padang Cermin diantaranya yaitu desa Padang Cermin, Durian, Sanggih, Gayau, Paya, Hanu Berak, Bajaran, Khepong Jaya dan Trimulyo karena terkendala dengan dana ADD tahun 2016 yang minim. Selain terkendala dengan dana ADD, dana yang diperoleh hanya di fokuskan pembangunan gorong-gorong yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin. Namun ada beberapa desa yang mengalokasikan dengan baik yaitu desa Tambangan dan Way urang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa diterapkan yaitu:

1. Untuk pemerintah pusat agar dapat menambah ADD karena dana sangat minim untuk keperluan Kecamatan Padang Cermin.
2. Untuk pemerintah daerah seharusnya memperhartikan pelatihan pengelolaan keuangan untuk aperatur desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Untuk pemerintah desa seharusnya program alokasi dana desa lebih mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan benar-benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Seharusnya porsi pembagian dana desa harus sesuai dengan peraturan, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Kemampuan penulis sangat terbatas untuk lebih mendalami masing-masing desa khususnya di Kecamatan Padang Cermin, penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya lebih mandalami data tentang program dan alokasi dana desa di setiap desa. Terlebih tahun-tahun selanjutnya dana ADD ini semakin besar, jadi dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam dalam pelaksanaan ADD ini.